

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TENAGA KERJA DAN ANALISIS *MULTIDIMENSIONAL SCALING* (MDS) DALAM MENGELOMPOKKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BERBAGAI PROVINSI

(The Changing in Economic Structure of Employment and Multidimensional Scaling Analysis in Grouping Employment Absorption in Provinces)

Edmira Rivani*

*P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Gedung Nusantara 1 Lantai 2 Setjen DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
email: rif_green@yahoo.com.

Naskah diterima: 29 Januari 2014

Naskah direvisi: 14 Maret 2014

Naskah diterbitkan: 20 Juni 2014

Abstract

The structure of a nation's economy, among others, is reflected in the structure of employment. This research is aimed to analyze economic structure and the changing role of economic sectors especially in employment absorption. Employment absorption in agricultural sector is larger than in industry sector but employment absorbed in the agricultural sector decreases than in the industry sector during the year of 2010-2013. Analysis Multidimensional Scaling (MDS) is used for digging up information about similarity and it will show the ability of each sector of the economy in employment absorption. Analysis of MDS shows that the agricultural sector absorbs the highest rate of employment in Provinces of Aceh, West Sumatera, Riau, Riau Island, Jambi, Bangka Belitung Island, Bengkulu, Bali, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, West Sulawesi, Southeast Sulawesi, Maluku, and Papua, while the manufacturing sector absorbs the highest rate of employment in Provinces of East Java, Central Java, North Sumatera, and South Sulawesi. Based on the fact of declining amount of employment in the agricultural sector, it can be inferred as representing the development progress signal, supported by the increasing number of employment in manufacturing and services sector, and the trend of unemployment decline during recent years in Indonesia.

Keywords: *economy sectors, employment absorption, Multidimensional Scaling (MDS)*

Abstrak

Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi dan pergeseran peranan sektor ekonomi terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri namun tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) yang merupakan suatu teknik untuk menggali informasi tentang suatu kemiripan (*similarity*) sehingga terlihat kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menyerap tenaga. Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua, sedangkan manufaktur adalah sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun dapat disimpulkan hal tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan, yang didukung dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang meningkat, serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Kata kunci: sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja, analisis *Multidimensional Scaling* (MDS)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.¹ Pembangunan ekonomi

negara berkembang mempunyai empat dimensi pokok yaitu (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.² Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu

¹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 12.

² Yurnisvita, "Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (9)2, Desember 2011, hal 90-99.

Tabel 1. Karakteristik Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2002-2012

Populasi dan Angkatan Kerja	2002	2005	2008	2011	2012
Pendudukan ≥ 15 Tahun (jutaan)	148,72	158,49	166,64	171,75	173,89
Angkatan Kerja (jutaan)	100,78	105,86	111,84	117,37	118,04
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	67,80	66,80	67,20	68,30	67,90
Bekerja (jutaan)	91,65	93,96	102,55	109,67	110,80
Tingkat Partisipasi Kerja (persen)	90,94	88,76	91,61	93,40	93,89
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,06	11,24	8,39	6,56	6,14
Setengah Pengangguran					
(Di bawah 25 jam/minggu) (persen)	18,40	18,70	18,60	17,80	17,50
(Di bawah 35 jam/minggu) (persen)	34,30	33,80	32,50	31,50	31,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013.

sendiri. Secara umum pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan menaikkan mutu hidup yang dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut. Ketimpangan yang terjadi dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan

Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia memiliki angkatan kerja yang sangat besar. Secara umum pasar kerja Indonesia dicirikan oleh kelebihan penawaran tenaga kerja yang sangat tinggi, pengangguran yang *masive* dan kualitas tenaga kerja yang rendah.

Tabel 1 memperlihatkan karakteristik dasar tenaga kerja Indonesia selama 10 tahun terakhir (tahun 2002-2012). Angkatan kerja Indonesia selama periode tersebut tumbuh sebesar 15,97 persen dengan rata-rata pertumbuhan 1,6 persen pertahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami sedikit kenaikan dari 67,76 persen tahun 2002 menjadi 67,88 persen tahun 2012. Kenaikan jumlah angkatan kerja dan TPAK ini disebabkan pertumbuhan alamiah, yaitu didorong oleh pertumbuhan penduduk. Sedang pertumbuhan penduduk yang bekerja selama periode tersebut mencapai sekitar 20,2 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,8 persen pertahunnya.³

Sesuai dengan Gambar 1 terlihat bahwa tingkat partisipasi kerja (TPK) mengalami kenaikan secara perlahan seiring menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Saat krisis ekonomi global tahun 2008, TPK sedikit mengalami kenaikan seiring penurunan

TPT. Secara perlahan TPK meningkat hingga mencapai 93,9 persen dan TPT menurun hingga mencapai 6,1 persen pada tahun 2012.⁴ Berdasarkan data tersebut terlihat adanya permasalahan akibat bertambahnya penduduk usia produktif, karena perekonomian di Indonesia belum cukup besar untuk menyediakan lapangan kerja secara optimal bagi pengangguran dan angkatan kerja baru yang semakin bertambah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu (1) apakah terjadi kesenjangan penyerapan tenaga kerja di masing-masing provinsi, (2) apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja, dan (3) bagaimana potensi penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor ekonomi di masing-masing provinsi.

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi apakah terjadi kesenjangan penyerapan tenaga kerja di masing-masing provinsi, (2) menganalisis pergeseran struktur ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja, dan (3) menganalisis penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor ekonomi di wilayah Indonesia.

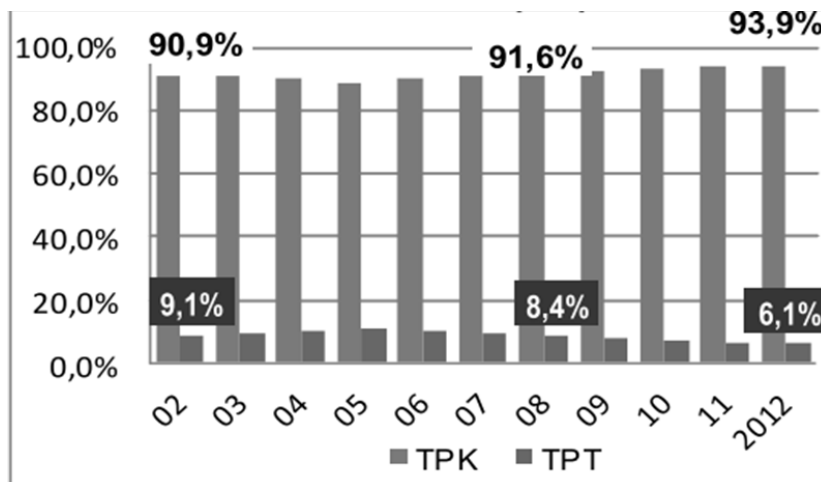
II. KERANGKA TEORI

A. Teori Perkembangan Struktur Ekonomi

Perubahan pada permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan pada komposisi produksi dan teknologi yang digunakan. Di pihak lain, pasokan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor demografis (pertambahan penduduk), tingkat pendidikan, dan persebaran penduduk antara daerah perdesaan

³ Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2013", Berita Resmi Statistik No. 35/05/Th. XVI, 6 Mei 2013.

⁴ *Ibid.*



Sumber: International Labour Organization (ILO), 2013.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Kerja dan Pengangguran Terbuka Tahun 2002-2012

dan kawasan perkotaan.⁵ Interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja dipengaruhi alokasi atau pola penggunaan tenaga kerja menurut sektor ekonomi yang menunjukkan perbedaan produktivitas tenaga kerja di antara sektor-sektor ekonomi. Dalam proses akumulasi menyangkut penambahan modal fisik maupun peningkatan mutu modal manusia. Seiring perjalanan waktu juga terjadi perubahan perimbangan di antara faktor-faktor produksi (*factors proportion*) yang terlibat pada proses produksi. Hal tersebut membawa perubahan pada komposisi sektoral dalam struktur produksi. Demikian terlihat bahwa pembangunan berkisar pada pergeseran struktur dalam produksi maupun dalam konsumsi.⁶ Perubahan struktural yang terjadi pada tiap-tiap negara sebenarnya dapat diidentifikasi dan proses perubahan secara umum dari masing-masing negara pada dasarnya memiliki pola yang sama.⁷

Secara umum negara yang memiliki tingkat populasi tinggi menggambarkan tingkat permintaan potensial yang tinggi dan cenderung untuk mendirikan industri yang bersifat substitusi impor. Artinya negara tersebut memproduksi sendiri barang-barang yang dulunya diimpor untuk kemudian dijual di pasaran dalam negeri. Sebaliknya negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil cenderung mengembangkan industri yang berorientasi ke pasar internasional. Teori transformasi struktural menjelaskan bahwa percepatan dan pola transformasi yang terjadi pada suatu negara

dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern yang saling berkaitan satu sama lain.

B. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan.⁸

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subsektor yaitu kelompok pekerja dan penganggur. Pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan, dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan. Bila penyediaan tenaga kerja dan jenis tingkatan pendidikan tertentu lebih besar dari kebutuhan dalam kelompok jabatan yang sepadan maka akan terjadi pengangguran.⁹ Pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat, oleh karena

⁵ Adi Tripambudi, "Analisis Pergeseran Struktur Perekonomian Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah", Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

⁶ "Badan Pusat Statistik. Konsep dan Penjelasan Teknis", (http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=06, diakses 18 Maret 2014).

⁷ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994), hal 10.

⁸ Ida Bagus Mantra, *Demografi Umum*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), hal 225.

⁹ *Ibid.*

itu kewajiban pemerintah untuk menyesuaikan rencana pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja. Dengan begitu, jelas bahwa perencanaan pembangunan erat hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja.

C. Permasalahan Ketenagakerjaan

Salah satu persoalan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah masalah pengangguran. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut rencana tenaga kerja nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014 menyatakan faktor tersebut di antaranya adalah stabilitas politik, masih sulitnya arus masuk modal asing, iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Masalah lain, yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang dalam banyak hal seringkali tidak mendukung penciptaan lapangan kerja atau tidak ramah terhadap tenaga kerja.¹⁰

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang sangat multidimensi ini tentunya memerlukan cara penyelesaian yang multidimensi pula. Masalah lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Walaupun angka pengangguran lulusan perguruan tinggi terus meningkat, tetapi sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan pendidikan dasar (SD-SMP) yang tentunya memiliki daya saing yang relatif rendah. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang setiap tahun bertambah sehingga berdampak pada tingginya jumlah penganggur.¹¹

D. Kebijakan Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks sehingga penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pendekatan yang multidimensi pula. Masalah ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal memerlukan kebijakan pasar kerja yang fleksibel. Melalui kebijakan itu, pihak pengusaha diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan internal melalui penyelesaian tingkat upah, bukan melalui pemutusan hubungan kerja yang berdampak sangat luas. Kebijakan semacam itu diharapkan

dapat mempersempit tingkat kesenjangan upah antara lapangan usaha formal dan sektor informal, menekan laju kenaikan pengangguran terbuka, serta menurunkan angka kemiskinan. Lapangan usaha pertanian juga perlu diperkuat karena sebagian besar pekerja Indonesia masih mengandalkan lapangan usaha tersebut. Namun perlu dicatat bahwa pertanian tidak mudah dijangkau oleh kebijakan ketenagakerjaan secara langsung, tetapi perlu ditempuh melalui upaya tidak langsung yaitu melalui pengaturan tata niaga produk pertanian dan harga input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan sebagainya, serta penyesuaian harga jual pertanian yang layak bagi petani jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak sangat luas dan serius terhadap kesejahteraan petani miskin dan petani serta pedagang berskala kecil, serta akan memberikan dampak yang tidak baik pula bagi memburuknya peluang kerja pada musim panen ataupun musim tanam bagi buruh tani.

Perhatian lebih besar perlu juga diberikan kepada sektor industri manufaktur yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa upaya ke arah ini dalam praktiknya menghadapi sejumlah kendala sejak dari proses permohonan izin usaha, permohonan kredit bank sampai sejumlah jenis "retribusi" pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah agar berupaya menangani masalah ketenagakerjaan dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya pemerintah mengharapkan adanya kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam mengimplementasikan kebijakan program yang komprehensif dalam penciptaan lapangan kerja. Untuk mengurangi angka pengangguran yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan meningkatkan daya saing, maka dalam Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014 menetapkan kebijakan dan program pembangunan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:¹²

1. mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;

¹⁰ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014", Jakarta, 2010.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

5. mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. menyempurnakan kebijakan migrasi; dan
9. mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggambarkan analisis kondisi penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis diharapkan bisa memberikan masukan yang bisa dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor ekonomi, untuk mengurangi permasalahan ketenagakerjaan khususnya pengangguran. Analisis dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder dengan studi literatur dan dokumen-dokumen yang ada. Pengumpulan data sekunder baik dari buku-buku teks, informasi dari internet maupun data penelitian sebelumnya. Sementara, dalam pengelompokan penyerapan tenaga kerja analisis yang digunakan adalah *Multidimensional Scaling* (MDS) yang merupakan suatu teknik untuk menggali informasi tentang suatu kemiripan (*similarity*) di antara sejumlah obyek.¹³ Informasi jarak atau kemiripan tersebut dengan teknik yang terdapat dalam MDS diubah menjadi bentuk geometri dari obyek-obyek tersebut dalam suatu peta atau grafik berdimensi tertentu. MDS sering disebut sebagai *perceptual map* karena pembandingannya dilakukan dengan diagram atau peta atau grafik. Data dalam kajian ini merupakan data sekunder dari BPS yang merupakan jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi masing-masing provinsi.

Data yang digunakan dalam pengolahan merupakan data metrik untuk mengetahui pengelompokan penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi masing-masing provinsi sehingga digunakan MDS Metrik. MDS Metrik mengasumsikan bahwa data setidaknya mempunyai skala pengukuran interval atau rasio. Perhitungan jarak antara obyek-obyek dalam peta (jarak *Euclidian*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁴

1. misalkan matriks yang berdimensi $n \times n$ yang berisikan jarak antar obyek yang disebut matriks D. Matriks ini mempunyai diagonal nol dan simetri non negatif.
2. kuadratkan setiap elemen matriks D.

3. buat matriks B dengan elemen-elemen sebagai berikut:

$$b_j = -\frac{1}{2}(d_j^2 - d_i^2 - d_j^2 + d^2)$$

Di mana:

$$d_i^2 = \frac{1}{n} \sum_j d_j^2$$

$$d_j^2 = \frac{1}{n} \sum_i d_i^2$$

$$d^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i,j} d_{ij}^2$$

4. analisis *eigenvalue* $\lambda_{(1)}$, $\lambda_{(2)}$ dan *eigenvector* $X=[X_{(1)}, X_{(2)}]$ dari matriks B untuk mendapatkan koordinat obyek-obyek dalam ruang 2 dimensi yang ditunjukkan oleh baris dari X.

- a. $X_{(1)} = (X_{11}, X_{21} \dots X_{n1})$

- b. $X_{(2)} = (X_{12}, X_{22} \dots X_{n2})$

Di mana n merupakan banyaknya obyek, (X_{11} , X_{12}) menunjukkan posisi obyek 1 dalam ruang 2 dimensi

Obyek penelitian ini adalah sektor ekonomi yang terdiri dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri manufaktur; listrik, gas, dan air; konstruksi; perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, *real estate*, usaha penyewaan dan jasa perusahaan; serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dengan variabel pendukungnya adalah masing-masing provinsi.

Sementara, untuk menilai suatu konfigurasi dari objek sebagai titik-titik dalam dimensi q sudah layak harus menggunakan ukuran kesesuaian yaitu nilai *Stress*. Nilai *Stress* adalah ukuran kesalahan (*Lack of Fit of Error*), di mana semakin kecil nilai *Stress* akan memberi indikasi bahwa semakin kecil *error* antara jarak dan nilai kemiripan dari ruang yang disajikan, dengan kriteria hubungan yang monoton antara kemiripan dengan jarak akhir sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Nilai *Stress*

Nilai <i>Stress</i>	Kriteria
> 20 persen	Kurang
10 – 20 persen	Cukup
5 – 10 persen	Baik
2,5 – 5 persen	Sangat Baik
< 2,5 persen	Sempurna

Sumber: Johnson & Wichern, 2002.

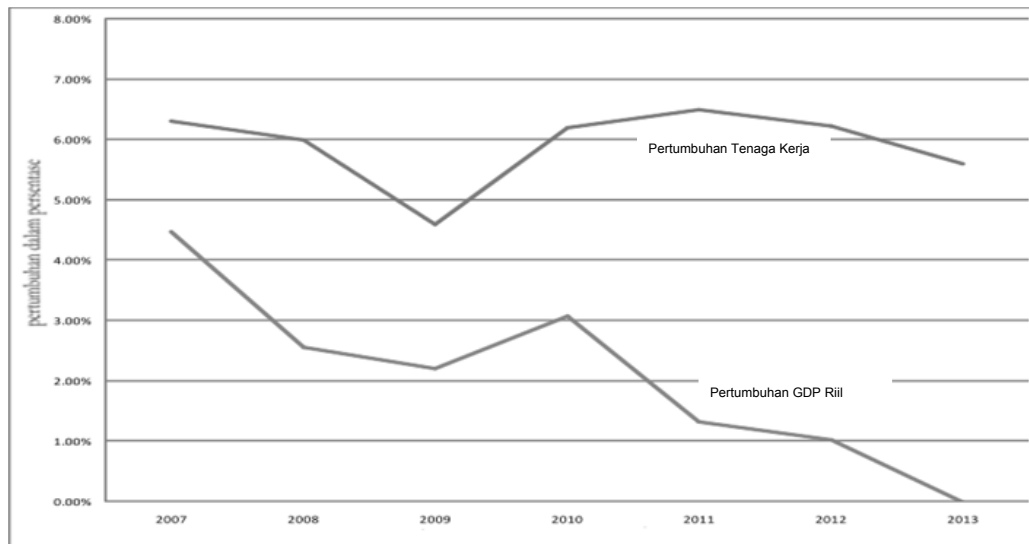
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Ketenagakerjaan Nasional

Data pertumbuhan lapangan kerja antara bulan Agustus 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa situasi

¹³ R. A. Johnson and D. W. Wichern, *Applied Multivariate Statistical Analysis*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc, 2002), hal 47.

¹⁴ *Ibid.*



Sumber: BPS, 2013

Gambar 2. Tingkat Pertumbuhan Riil Produk Domestik Bruto dan Lapangan Kerja Tahun 2007-2013 (Persen)

kerja relatif stagnan atau menurun sepanjang tahun. Namun, data dari survei Sakernas bulan Februari dan Mei menunjukkan hasil yang berbeda, dan mengindikasikan bahwa pekerjaan telah berkembang (dari tahun ke tahun) pada semester pertama tahun 2013. Di samping itu, ada beberapa indikasi terjadinya gejala di pasar kerja, di mana jumlah pekerja di daerah perkotaan meningkat hingga hampir mencapai 1 juta sedangkan jumlah pekerja di desa berkurang mendekati 1 juta antara bulan Agustus 2012 dan Agustus 2013. Oleh karena itu terdapat kemungkinan bahwa penurunan pada indikator ekonomi yang terjadi di awal 2013 baru terjadi dalam pasar kerja di bulan Agustus 2013, dan selanjutnya situasi kerja mengalami kemunduran. Berdasarkan hal ini, penyesuaian juga terlihat dari penurunan partisipasi angkatan kerja dari 67,9 persen di bulan Agustus 2012 menjadi 66,9 persen di bulan Agustus 2013.¹⁵

Kesenjangan antar daerah juga tetap ada, dengan angkatan kerja terus akan berkumpul di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, sementara hasil kerja terus memburuk di bagian timur Indonesia. Dari segi lokasi, daerah perkotaan menyumbang 48,8 persen lapangan kerja, sedangkan daerah pedesaan menyumbang 51,2 persen lapangan pekerjaan pada bulan Mei 2013.¹⁶ Tingkat partisipasi angkatan kerja juga lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan.

Rasio lapangan pekerjaan dan penduduk (porsi dari penduduk usia kerja yang bekerja) diperkirakan sekitar 65 persen dari November 2012 sampai Mei 2013 yang lebih tinggi dari rata-rata global tahun

2012 yaitu 60,3 persen. Tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada bulan Mei 2013, pengangguran diperkirakan mencapai 5,8 persen, tingkat pengangguran terendah dicapai di Indonesia selama dekade terakhir. Namun, penurunan terbaru dalam indikator ekonomi telah melihat adanya peningkatan tingkat pengangguran hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005.¹⁷ Tertinggi terlihat di kalangan lulusan SMA dan SMK. Mereka umumnya berusia antara 15 sampai 25 tahun dan belum punya pengalaman kerja. Secara umum, sebagian besar pekerja yang menganggur di Indonesia sedang mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil yang sudah merasa putus asa mencari pekerjaan atau sedang mempertimbangkan upaya untuk membuka usaha sendiri atau menunggu dibukanya lowongan kerja baru.

Saat ini perumusan strategi sangat penting untuk memulihkan tren pengangguran yang menurun sebelumnya, untuk memastikan bahwa target menurunkan pengangguran antara lima dan enam persen dapat dicapai pada tahun 2014. Pengangguran terus tersebar secara tidak merata di seluruh kelompok demografis, dari Gambar 3 terlihat bahwa sekitar 70 persen pengangguran pada tahun 2013, berusia antara 15 dan 29 tahun.

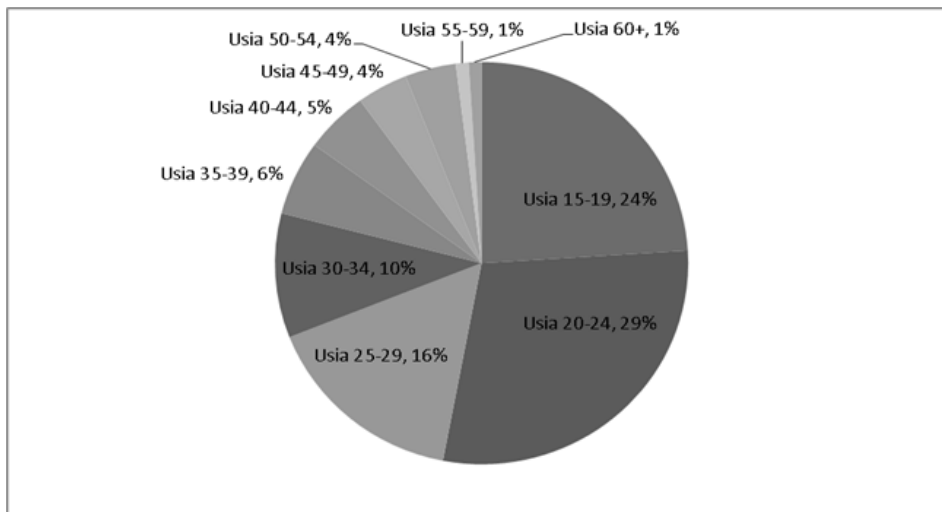
B. Kontribusi Tiap Sektor dalam Perekonomian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 6,33 persen, dan tahun 2013 diperkirakan laju pertumbuhannya semakin

¹⁵ ILO, "Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia Tahun 2013: Memperkuat Pekerjaan Layak Dalam Kestetaraan Pertumbuhan 2013", International Labor Organization, Jakarta, 2013.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*



Sumber: BPS, 2013

Gambar 3. Pengangguran Berdasarkan Usia Tahun 2013

besar, yaitu sebesar 6,90 persen.¹⁸ Pertumbuhan tersebut diperkirakan dari adanya dukungan investasi dan konsumsi rumah tangga yang meningkat, serta diperkirakan masih bertahannya kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara-negara kawasan Asia. Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin meningkat, hal ini didorong oleh berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian investasi serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi serta adanya *National Summit* 2009 beberapa waktu lalu maka pemerintah akan melakukan berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Apabila pembangunan infrastruktur berjalan lancar maka dampaknya bukan hanya pada serapan tenaga kerja di sektor infrastruktur saat pengerjaan proyek, namun juga punya dampak *multiplier effect* yang menggairahkan perekonomian sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor lain.

Sektor listrik, gas, dan air bersih, angkutan dan komunikasi serta sektor keuangan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Kondisi ini diperkirakan akan tetap berlangsung. Pada dua tahun tersebut diperkirakan kontribusi beberapa sektor akan terjadi sedikit penurunan di antaranya sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, dan sektor jasa. Sedangkan sektor-sektor industri manufaktur, listrik, bangunan, perdagangan dan keuangan kontribusinya mengalami sedikit peningkatan. Kontribusi sektor industri (25,99 persen) diperkirakan masih menjadi sektor unggulan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, kemudian diikuti sektor perdagangan (17,77 persen) dan

sektor pertanian (12,44 persen), demikian juga pada tahun 2013 sektor industri (26,10 persen), sektor perdagangan (17,99 persen) dan sektor pertanian (12,05 persen) posisinya tidak berubah. Sedangkan sektor-sektor lainnya kontribusinya kurang dari 10 persen.

Dilihat dari pengaruh perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja, maka sangat berpengaruh positif. Perkembangan sektor pertanian belum optimal, hal ini tercermin dari kemampuannya dalam menciptakan kesempatan kerja diperkirakan rendah, dengan laju perekonomian pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 3,33 persen dapat mendorong kontribusi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 12,44 persen dan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 39,66 juta orang. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian diperkirakan meningkat menjadi 3,55 persen, namun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu diperkirakan belum mampu meningkatkan kontribusi pembentukan PDB, malah sedikit mengalami penurunan sehingga menjadi 12,05 persen. Pada tahun 2012 diperkirakan dari 112,37 juta penduduk yang bekerja, sekitar 35 persennya bekerja di sektor pertanian.

Sektor pertambangan pada tahun 2012 menyumbang PDB terendah ketiga yaitu sebesar 7,39 persen setelah sektor listrik, gas, dan air (0,86 persen) serta sektor bangunan (6,96 persen). Sektor industri merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia, pada tahun 2012 menyumbang 25,99 persen, meningkat menjadi 26,10 persen pada tahun 2013. Sektor industri tergolong besar pengaruhnya terhadap pembentukan PDB, namun penyerapan tenaga kerjanya urutan keempat setelah sektor pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan.

¹⁸ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Tahun 2012-2013", Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2011.

Tabel 3. Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2012-2013

(dalam persen)

No	Sektor Lapangan Usaha	2012		2013	
		Kontribusi	Laju Pertumbuhan	Kontribusi	Laju Pertumbuhan
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	12,44	3,33	12,05	3,55
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,39	1,73	7,04	1,85
3.	Industri Manufaktur	25,99	6,8	26,10	7,35
4.	Listrik, Gas, dan Air	0,86	11,35	0,90	12,36
5.	Konstruksi	6,96	10,06	7,24	11,18
6.	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	17,77	7,66	17,99	8,21
7.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	9,58	7,32	9,61	7,23
8.	Lembaga Keuangan, <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	9,97	8,65	10,23	9,65
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	9,04	4,16	8,85	4,57
	Jumlah	100	6,33	100	6,90

Sumber: RPJM Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010-2014.

C. Pengelompokan Sektor Ekonomi Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, industri, dan sektor jasa kemasyarakatan. Pada tahun 2010, penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 41,49 juta orang dan pada tahun 2011 menurun menjadi sebanyak 39,33 juta orang atau

turun sebesar 5,2 persen. Sektor perdagangan pada tahun 2010 sebanyak 22,49 juta orang, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sehingga menjadi 23,40 juta orang atau tumbuh sebesar 4,05 persen.

Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2013 belum ada perubahan yang signifikan, penyerapan tenaga kerja terbesar masih dikontribusikan dari sektor pertanian, perdagangan,

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2010-2013

Lapangan Pekerjaan Utama	2010		2011		2012		2013
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	42.825.807	41.494.941	42.475.329	39.328.915	41.205.030	38.882.134	39.959.073
Pertambangan dan Penggalian	1.188.634	1.254.501	1.352.219	1.465.376	1.620.028	1.601.019	1.555.564
Industri Manufaktur	13.052.521	13.824.251	13.696.024	14.542.081	14.211.562	15.367.242	14.784.843
Listrik, Gas, dan Air	208.494	234.070	257.270	239.636	297.805	248.927	254.528
Konstruksi	4.844.689	5.592.897	5.591.084	6.339.811	6.103.457	6.791.662	6.885.341
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	22.212.885	22.492.176	23.239.792	23.396.537	24.020.934	23.155.798	24.804.705
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.817.680	5.619.022	5.585.124	5.078.822	5.191.771	4.998.260	5.231.775
Lembaga Keuangan, <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.639.748	1.739.486	2.058.968	2.633.362	2.779.201	2.662.216	3.012.770
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	15.615.114	15.956.423	17.025.934	16.645.859	17.373.017	17.100.896	17.532.590
Total	107.405.572	108.207.767	111.281.744	109.670.399	112.802.805	110.808.154	114.021.189

Sumber: BPS, 2013.

jasa kemasyarakatan, dan sektor industri. Namun, dapat terlihat bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan meskipun hal ini merupakan sinyal kemajuan pembangunan mengingat jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat di mana penyerapan tenaga kerja naik dari 22,2 juta orang atau 19,71 persen pada Februari 2012 menjadi 23,5 juta atau 20,15 persen pada Februari 2013. Serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia seperti terlihat pada Tabel 1, di mana pengangguran dari tahun 2008-2012 terus mengalami penurunan.

Tabel 5. Hasil Iterasi Nilai S-Stress

Young's Stress Formula		
Iterasi ke-	S-Stress	Penambahan Nilai S-Stress
1	0,58939	
2	0,38335	0,20603
3	0,32180	0,06155
4	0,28701	0,03479
5	0,26554	0,02146
6	0,25163	0,01391
7	0,24239	0,00924
8	0,23616	0,00623
9	0,23190	0,00426
10	0,22895	0,00295
11	0,22686	0,00209
12	0,22536	0,00151
13	0,22424	0,00111
14	0,22340	0,00084
Untuk Matriks		
RSQ		0,73899

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 13.

Penggambaran lebih jelas lagi untuk pengelompokan sektor ekonomi berdasarkan penyerapan tenaga kerja bisa dilakukan menggunakan analisis MDS. Analisis tersebut berbentuk peta persepsi yang bertujuan untuk mengetahui posisi setiap obyek (sektor ekonomi) dan peubah. Tahap pertama dalam analisis ini adalah membuat matriks jarak dengan menggunakan rumus jarak *euclidean*, selanjutnya lakukan analisis MDS non metrik.

Hasil analisis ini menghasilkan nilai *stress* sebesar 0,00086, di mana nilai kesesuaian sudah memenuhi kriteria dan mendekati nilai 0, dan nilai *R-Square* sebesar 0,7389 berarti peta yang terbentuk dapat menerangkan data sebenarnya sebesar 73,89 persen. Berikut adalah gambar peta persepsi untuk penilaian sektor ekonomi berdasarkan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, seperti terlihat pada Gambar 4.

Peta posisi dari kasus di atas memperlihatkan bahwa sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan

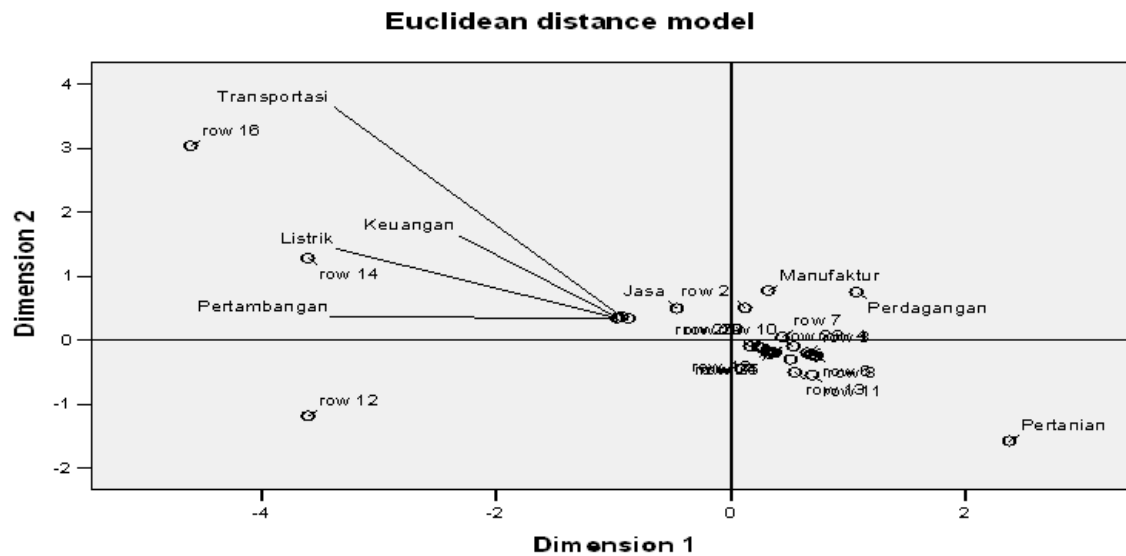
perorangan; transportasi, pergudangan dan komunikasi; pertambangan dan penggalian; listrik, gas, dan air, serta lembaga keuangan, real estate; usaha persewaan dan jasa perusahaan mempunyai kemiripan dalam menyerap tenaga kerja karena berada dalam kuadran yang sama yaitu kuadran 2. Sementara sektor manufaktur dan perdagangan membentuk kelompok dalam kuadran 1, sedangkan sektor pertanian berbeda sendiri dengan sektor-sektor lainnya di kuadran 4. Hal ini cukup menggambarkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sektor perdagangan dan industri manufaktur adalah sektor yang sedang berkembang dan mengalami kemajuan dalam menyerap tenaga kerja, sementara sektor jasa, transportasi, pertambangan, serta listrik, gas, dan air adalah sektor yang belum berkembang dalam menyerap tenaga kerja.

Dari dimensi 1 (peta posisi) terlihat bahwa semakin ke kanan, angka dimensi 1 semakin besar. Juga terlihat bahwa sektor pertanian berada paling dekat dengan angka dimensi 1 yang terbesar (di ujung kanan garis horisontal). Hal ini berarti bahwa sektor pertanian mempunyai faktor-faktor yang sangat membedakan dibanding sektor yang lain, yang menggambarkan juga bahwa sektor pertanian sangat banyak menyerap tenaga kerja di provinsi yang masuk ke dalam dimensi 1 seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan sektor pertambangan, serta listrik, gas, dan air karena terletak paling kiri dengan angka paling kecil, maka di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menyerap tenaga kerja paling sedikit.

Pada Gambar 4 untuk dimensi 2 (peta posisi) menunjukkan semakin ke atas, angka dimensi 2 semakin besar. Posisi tersebut menggambarkan bahwa sektor industri manufaktur berada paling dekat dengan angka dimensi 2 yang terbesar (di ujung atas garis vertikal), disusul dengan perdagangan. Hal ini berarti sektor industri manufaktur banyak menyerap tenaga kerja seperti di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sektor pertanian karena terletak paling bawah dengan angka paling kecil, maka di Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta menyerap tenaga kerja paling sedikit.

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor pertanian di provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara

Derived Stimulus Configuration



Keterangan:

Row 1 = Aceh	Row 10 = Lampung	Row 19 = NTT	Row 28 = Sulbar
Row 2 = Sumatera Utara	Row 11 = DKI Jakarta	Row 20 = Kalbar	Row 29 = Sultra
Row 3 = Sumatera Barat	Row 12 = Jawa Barat	Row 21 = Kalteng	Row 30 = Maluku
Row 4 = Riau	Row 13 = Banten	Row 22 = Kalsel	Row 31 = Maluku Utara
Row 5 = Kepulauan Riau	Row 14 = Jawa Tengah	Row 23 = Kaltim	Row 32 = Papua
Row 6 = Jambi	Row 15 = D i Yogyakarta	Row 24 = Sulawesi Utara	Row 33 = Papua Barat
Row 7 = Sumatera Selatan	Row 16 = Jawa Timur	Row 25 = Gorontalo	
Row 8 = Kepulauan Babel	Row 17 = Bali	Row 26 = Sulawesi Tengah	
Row 9 = Bengkulu	Row 18 = NTB	Row 27 = Sulawesi Selatan	

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 13.

Gambar 4. Hasil Analisis *Multidimensional Scaling*

Barat membawa beberapa implikasi pokok seperti (1) semakin menurunnya produktivitas kerja sektor pertanian, karena kelebihan tenaga kerja tidak dapat direspon dengan perluasan areal; (2) meningkatnya pengangguran tidak kentara, yang jika tidak segera dicari pemecahannya akan mempunyai implikasi sosial ekonomi yang luas; (3) semakin sulit meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanaman, pengembangan usaha tani komoditas komersial yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan manajemen usaha tani, serta pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Meskipun sektor pertanian menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbesar, namun jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Setidaknya ada tiga hal kemungkinan penyebab

berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yaitu (1) lahan pertanian yang sempit, sehingga tidak mampu dijadikan mata pencaharian utama untuk anggota keluarga sehingga terpaksa menganggur atau mencari pekerjaan di luar usaha tani, (2) adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian, dan (3) keengganan untuk terjun pada sektor pertanian khususnya untuk golongan muda terdidik karena dipandang tidak menarik sehingga lebih memilih pekerjaan lain atau menganggur. Secara makro, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian masih cukup tinggi, sementara sumbangan sektor pertanian terhadap PDB semakin menurun, sehingga mengakibatkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kesenjangan penyerapan tenaga kerja antardaerah

tetap ada, dengan angkatan kerja terus akan berkumpul di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, sementara hasil kerja terus memburuk di bagian timur Indonesia. Pengangguran juga tersebar secara tidak merata di seluruh kelompok demografis, di mana sekitar 70 persen pengangguran berusia antara 15 dan 29 tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga lebih tinggi di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan, di mana sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua, sedangkan industri manufaktur adalah sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Ketidakseimbangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia juga terlihat di mana sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja di beberapa daerah ternyata menjadi sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja di daerah lain, serta sektor-sektor lain masih belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja khususnya sektor listrik, gas, dan air karena sektor tersebut selain sedikit menyerap tenaga kerja juga mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dari tahun lalu.

Meskipun penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri namun tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2010-2013. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan. Hal itu mengingat jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat, serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan paparan di atas, maka terdapat beberapa saran yang bisa dikemukakan di antaranya seperti agar pemerintah lebih cermat dalam melihat transformasi ekonomi yang terjadi dengan memanfaatkan sektor potensial/unggulan seperti sektor perdagangan dan jasa yang menyerap tenaga kerja cukup banyak selain pertanian dan manufaktur, tanpa mengesampingkan sektor-sektor nonunggulan dan tertinggal seperti seperti sektor keuangan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pertambangan dan

penggalian, sektor konstruksi, sektor angkutan dan komunikasi dengan memantapkan dan meningkatkan kinerja sektor-sektor tersebut agar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak guna menyokong pembangunan regional dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan dan dapat bersaing dengan sektor-sektor lain.

Meskipun jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan, pemerintah masih perlu memperhatikan sektor ini agar mempunyai produktivitas yang tinggi. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanaman, pengembangan usaha tani komoditas komersial yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan manajemen usaha tani, serta pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994.
- Johnson, R. A. and Wichern, D. W. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. New Jersey: Prentice Hall, Inc, 2002.
- Mantra, Ida Bagus. *Demografi Umum*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Jurnal

- Sitanggang, Ignatia Rohana dan Nachrowi, Djalal. "Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Provinsi pada 9 Sektor di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 5(1), Juli 2004, hal. 103-133.
- Yusnisvita. "Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), Desember 2011, hal. 90-99.

Makalah

Hidayat, Amir dan Nazahara, Suahasil. "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) dan Kebijakan Strategi Pembangunan Jawa Timur Tahun 1994 dan 2000: Analisis Input Output". Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2005.

International Labor Organization. "Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia Tahun 2013: Memperkuat Pekerjaan Layak dalam Kesetaraan Pertumbuhan". ILO, Jakarta, 2013.

Skripsi

Pambudi, Andi Tri. "Pergeseran Struktur Perekonomian atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Laporan

Pamungkas. Adjie. "Laporan Penelitian: Aplikasi Model *Multidimensional Scaling* dalam Menilai Kesamaan Karakteristik Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur". Surabaya: ITS, 2004.

Sutikno. "Laporan Penelitian: Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur)". Malang: Universitas Muhamadiyah, 2008.

Dokumen

Badan Pusat Statistik. "Indonesia dalam Angka Tahun 2013". Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2013.

Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2013". Berita Resmi Statistik No. 35/05/Th. XVI, 6 Mei 2013.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 03/MEN/2010". Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Tahun 2012-2013". Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2011.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014". Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2010.

Lampiran 1. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tiap Provinsi Tahun 2013

No	Provinsi	Pertanian	Pertambangan	Industri Manufaktur	Listrik, Gas, dan Air	Bangunan	Perdagangan	Transportasi	Keuangan	Jasa
1.	Aceh	842.866	14.171	73.844	3.171	130.746	282.455	72.815	24.763	353.716
2.	Sumatera Utara	2.495.971	41.059	442.014	18.308	363.795	1.116.740	275.808	102.911	895.076
3.	Sumatera Barat	827.302	32.020	159.038	4.953	113.385	431.771	101.552	41.694	325.927
4.	Riau	1.073.024	44.655	146.435	8.042	122.539	492.730	97.127	70.716	343.734
5.	Kepulauan Riau	98.336	17.466	194.223	3.220	61.981	226.134	59.428	28.421	135.358
6.	Jambi	783.501	27.836	47.303	2.832	62.169	229.932	44.797	22.627	202.627
7.	Sumatera Selatan	1.991.353	48.608	196.967	6.837	141.795	508.305	121.299	71.700	446.068
8.	Kepulauan Bangka Belitung	166.607	129.147	35.971	1.866	31.250	115.880	13.788	10.658	77.935
9.	Bengkulu	436.880	7.503	33.849	1.672	40.755	142.753	24.004	12.121	130.729
10.	Lampung	1.666.372	27.939	329.416	5.132	189.897	625.338	123.226	33.745	448.242
11.	DKI Jakarta	25.498	14.827	706.871	6.107	175.913	1.595.659	438.553	434.798	1.440.370
12.	Jawa Barat	3.966.550	191.271	3.863.392	50.125	1.287.391	4.595.508	1.054.007	494.222	2.818.642
13.	Banten	602.859	63.943	1.190.185	15.866	237.977	1.122.201	292.192	211.153	869.471
14.	Jawa Tengah	5.064.377	91.208	3.297.707	26.564	1.207.067	3.447.147	547.944	282.810	2.168.066
15.	DI. Yogyakarta	502.570	13.602	282.602	2.721	132.849	464.415	61.339	57.228	350.382
16.	Jawa Timur	7.472.200	142.660	2.834.939	31.125	1.251.741	3.834.312	674.368	347.672	2.492.078
17.	Bali	572.685	7.637	311.225	6.347	185.764	625.302	85.711	83.876	390.161
18.	Nusa Tenggara Barat	875.660	48.800	168.272	3.840	93.972	372.505	70.596	27.560	317.559
19.	Nusa Tenggara Timur	1.291.191	29.537	158.501	2.176	81.634	154.124	95.738	18.484	264.298
20.	Kalimantan Barat	1.253.299	83.926	77.978	4.157	110.206	275.678	43.015	25.604	232.651
21.	Kalimantan Tengah	593.001	67.150	27.768	1.631	50.708	145.923	29.921	11.141	142.967
22.	Kalimantan Selatan	754.530	89.491	130.110	4.615	97.245	387.390	67.248	42.419	248.279
23.	Kalimantan Timur	459.077	161.898	96.777	6.186	104.930	347.740	73.704	54.420	314.386
24.	Sulawesi Utara	312.137	29.993	57.886	3.825	76.026	189.532	79.698	24.907	183.288
25.	Gorontalo	168.496	18.788	37.986	812	29.465	67.142	32.976	5.674	84.390
26.	Sulawesi Tengah	581.345	30.685	62.251	3.108	63.044	169.346	39.111	19.167	197.385
27.	Sulawesi Selatan	1.475.783	25.753	225.880	14.256	181.433	614.082	181.602	58.143	574.976
28.	Sulawesi Barat	314.290	3.837	27.471	0	23.000	83.027	15.984	4.208	76.966
29.	Sulawesi Tenggara	399.425	31.608	63.469	1.983	62.430	180.974	47.715	11.749	176.526
30.	Maluku	298.994	10.632	37.379	3.506	19.290	93.735	35.921	5.962	104.943
31.	Maluku Utara	244.167	10.907	14.883	935	17.396	51.707	26.057	3.943	73.951
32.	Papua	1.112.814	32.100	16.998	2.129	27.687	114.442	51.449	12.098	158.216
33.	Papua Barat	158.974	10.362	17.652	880	16.182	51.869	19.567	5.622	60.633

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN